

TESIS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**

**(CONSUMER PROTECTION AGREEMENT CLAUSE
CONTAINING RAW EXONERATION)**



Oleh:

ERWIDATI, S.H.
NIM. 050720101003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

TESIS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI
(CONSUMER PROTECTION AGREEMENT CLAUSE
CONTAINING RAW EXONERATION)**

Oleh:

**ERWIDATI, S.H.
NIM. 050720101003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**

**CONSUMER PROTECTION AGREEMENT CLAUSE
CONTAINING RAW EXONERATION**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

ERWIDATI, S.H.

NIM : 050720101003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

**TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 NOPEMBER 2013**

O l e h

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. FENDI SETYAWAN, SH, M.H.
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H, M.Hum.
NIP. 198010262008122001

M e n g e t a h u i :

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum - Universitas Jember,**

Prof.Dr. HEROWATI POESOKO, SH, M.H.
NIP. 194804281985032001

**JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**

Tanggal Ujian : 12 Nopember 2013
SK Penguji : 3026/UN25.1.1/SP/2013

Nama Mahasiswa : ERWIDATI, S.H.
NIM : 050720101003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Ilmu Ekonomi

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
Pembimbing Anggota : Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M. Hum

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H.,M.Hum.,C.N.
Dosen Penguji 2 : Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
Dosen Penguji 3 : Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
Dosen Penguji 4 : Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI,S.H., M.Hum

PENGESAHAN
PRINSIP PUBLISITAS PADA
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU
YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
CONSUMER PROTECTION AGREEMENT CLAUSE
CONTAINING RAW EXONERATION

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Nopember 2013

Susunan Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H.,M.Hum.,C.N.
NIP. 196303081988021001

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Menyetujui / Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M. Hum
NIP. 197105011993031001

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum) baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis merupakan gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember.

Jember, 12 Nopember 2013

Yang membuat pernyataan,

ERWIDATI, S.H.

NIM. 050720101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. MOH. HASAN, M.Sc., Ph.D. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran dan kritik yang membangun.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada ibu Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran dan kritik yang membangun.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H.,M.Hum.,C.N.

selaku Dosen Penguji I dan Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.. selaku Dosen Penguji II yang dengan penuh perhatian telah menguji dan memberikan saran serta kritik yang membangun agar tesis ini dapat mendekati kesempurnaan.

7. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dalam akademisi.
8. Saya ucapkan terimakasih untuk Bapak BHIM PRAKOSO yang telah banyak memberikan masukan-masukan, diskusi-diskusi dan bimbingan agar tesis menjadi lebih sempurna.
9. Saya haturkan terima kasih yang teramat dalam kepada orang tua saya yaitu Bapak DULMANAP, Ibu MUSRATIN dan Bapak PANUT, ibu PURWATI atas semua cinta kasihnya yang tak berkesudahan, doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang luar biasa sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
10. Saya ucapkan terimakasih yang teramat dalam untuk suamiku tercinta JANI TAKARIANTO dan anakku NADHIFA TRI QORIROH SAFITRI atas suport dan dukungan yang luar biasa, atas doa-doa dan cinta kasih yang telah diberikan selama ini. Terima kasih ya Allah Engkau hadirkan orang-orang yang luar biasa dalam kehidupanku .
11. Saya ucapkan terimakasih untuk Mbak Pung, Mas Chandra, Lies, Mursid, adikku Iwan, Fike, Wawan dan Ely, Aga dan Wiwit serta Keponakan-keponakanku Printa, Nunung, Dena, Defan, Faizah, Nabil, Chuby, Bira, Ail yang selalu suport luar biasa. Printa yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tesis. Bangga aku berada dalam keluarga yang penuh cinta kasih.
12. Saya ucapkan terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang luar biasa Irvin, Eta dan Damek, kehadiranmu membuat hidupku lebih berwarna.

13. Terimakasih yang tak terhingga untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, semoga kalian sukses dalam berkarir dan ilmunya bermanfaat.

Ringkasan

Dinamisasi kehidupan dalam suatu tatanan sosial masyarakat, tentunya sangat berpengaruh pula dengan perkembangan hukum. Setiap hubungan hukum antar individu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau perbuatan hukum antar individu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang memiliki daya ikat dan sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan ekonomi bisnis membuat perubahan pranata hukum terutama terkait dengan keberadaan konsumen. Dalam pembuatan perjanjian konsumen pada posisi tawar yang rendah sehingga adanya suatu perlindungan hukum. Pada saat konsumen berhadapan dengan pelaku usaha dalam konteks penandatanganan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi maka posisinya menjadi lemah. Pembuatan perjanjian baku berdasarkan argumentasi dari pelaku usaha adalah Tujuan pelaku usaha menggunakan perjanjian baku adalah untuk menghemat waktu dan tidak perlu terjadi proses tawar menawar disisi lain perjanjian baku juga digunakan untuk membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dengan adanya perjanjian baku, maka semua konsumen diperlakukan sama. Meskipun memberi keuntungan dalam hal efisiensi, namun perjanjian baku memiliki kekurangan. Yakni menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena yang membuat perjanjian tersebut adalah pihak pelaku usaha. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha tentunya berimplikasi pada perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah sistem perjanjian yang berlaku di Indonesia, keabsahan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dan perjanjian baku yang memberikan posisi keseimbangan dan keadilan terhadap para pihak. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang berpedoman mengenai peraturan-peraturan, buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif in action pada pencantuman klausula eksonerasi dan penyelesaian akibat penggunaan klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pergeseran tersebut disebabkan oleh: 1. tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar, 2. berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat, dan 3. masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak. Perjanjian baku pada hakekatnya merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sehingga pihak lainnya hanya dapat menyepakati bentuk, isi, dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut. Kesimpulan yang dapat diarah dari tesis ini adalah : 1). Hukum Perjanjian di Indonesia menganut ketentuan dari Belanda yang dapat dilihat dalam Buku III KUH Perdata. Mendasarkan Hukum Perjanjian kedalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1). Hal kewajiban para pihak, 2). Hal kebebasan berkontrak, 3). Hal Konsensualisme. Dan yang kedua perjanjian baku pada suatu

perjanjian atau kontrak telah memenuhi syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kontrak tersebut mulai berlaku apabila para pihak dalam perjanjian, yaitu perusahaan dan pelanggan telah sepakat mengenai isi perjanjian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut artinya kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Perjanjian baku dengan syarat eksonerasi dapat dibatalkan, karena kesepakatannya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat eksonerasi sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya kausa yang halal. Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi. Konsumen dapat menerapkan Doktrin *caveat emptor* yang berarti bahwa sebelum konsumen membeli sesuatu maka konsumen harus waspada kemungkinan adanya cacat pada barang. Dan yang ketiga hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak ini harus dibatasi bekerjanya, agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Klausula baku ditetapkan pelaku usaha pada perjanjian yang memenuhi ketentuan dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha, klausula eksonerasi yang dibuat dengan menggunakan berbagai rumusan kalimat dalam membatasi tanggung jawabnya berupa pengalihan, ataupun pengurangan terhadap tanggung jawabnya. Maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1). perjanjian baku sudah seyogyanya diatur dalam suatu peraturan perundangan agar hak dan kewajiban dari para pihak dapat diketahui dan dilindungi dengan jelas. 2). Pemerintah dapat mengatur melalui instrumen hukum bahwa perjanjian baku wajib mendapat pengesahan dari pihak yang berkompeten misalnya Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, tidak hanya sekedar didaftarkan ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Pengaturan terhadap perjanjian baku dapat dimasukkan ke dalam peraturan hukum memaksa yaitu demi kepentingan umum dan melindungi yang lemah.

Kata kunci : *Pelindungan konsumen, perjanjian baku, klausula eksonerasi*

Abstract

Dynamics of life in a social order, of course, also very influential in the development of law. Any legal relationship between individuals in the daily life of the community or legal actions between individuals embodied in an agreement which has a holding capacity and as an attempt to achieve a common goal. Economic development business to make changes to legal institutions primarily associated with the presence of the consumer. In the manufacture of consumer agreement in an inferior position to the existence of a legal protection. At a time when consumers are dealing with entrepreneurs in the context of treaty signatories containing raw exoneration clause, then the position becomes weaker. Preparation of standard contract based on the argument of entrepreneurs are entrepreneurs Destination using raw agreement is to save time and unnecessary bargaining process on the other side of raw agreement is also used to create uniformity in the services provided to consumers. With the standard contract, then all consumers are treated equally. Although the benefit in terms of efficiency, but the standard contract has its draw backs.

That is putting consumers in a weak position. This happens because that makes the agreement is usaha.Pencantuman perpetrator exoneration clause in the standard contract that transferred responsibility businessmen certainly have implications for the protection of consumers, businessmen and responsibilities in the protection of consumers in Indonesia. The problem in this thesis is applicable treaty system in Indonesia, the validity of the agreement containing the exoneration clause associated with the terms of the validity of the agreement and standard contract that gives the position of balance and fairness to the parties. Methods of data collection in this study include the normative legal research legal research guided by the regulations, books or other literature that deals with issues regarding the enforcement or implementation of normative law in action on the inclusion of the exoneration clause and settlement due to the use of the exoneration clause in the agreement standard in society. The shift is caused by: 1. tumbuhnya standard contract forms, 2. meaning reduced freedom of choice and the will of the parties, as a result of widespread government intervention in people's lives, and 3. masuknya consumer as the party of contract. Raw agreement is essentially a treaty that has been prepared in advance by one of the parties to the agreement, so the other party can only agree on the form, content, and the terms of the agreement. The conclusion that can diarahi of this thesis are: 1). Legal Agreements in Indonesia adheres to the provisions of the Netherlands can be seen in Book III of the Civil Code. Basing the Law of Treaties into 3 (three) things: 1). This obligation of the parties, 2). This freedom of contract, 3). It Konsensualisme. And the second on a standard contract agreement or contract has been agreed they qualify unites himself. The contract comes into force when the parties to the agreement, namely the company and the customer have agreed on the contents of the agreement. It can be seen from the signatures of both parties in the agreement means both parties bind themselves to each other. Raw agreement with terms exoneration may be canceled, because the deal is not

perfect , and null and void , by reason of exoneration as one of the requirements unfulfilled objective requirements of the existence of a lawful causes . The principle of responsibility is very important in consumer protection law , because the consumer is a group that is vulnerable to exploitation . Consumers can apply the Doctrine of caveat emptor , which means that before a consumer buys something then consumers should be alert to the possibility of defective goods . And the third law of contract in Indonesia as stipulated in Book III of the Code of Civil adheres to the principle of freedom of contract (Article 1338 Civil Code) . Freedom of contract should be limited operation , so that the agreement is made based on the principle that an agreement is not biased or skewed . Entrepreneurs set of standard clauses in agreements that comply with the provisions referred to in Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) shall be declared null and void . Exoneration clause is a clause containing a condition limiting or even removing altogether the responsibility should be borne by the party of business, exoneration clauses are made using the formulation of the sentence in limiting the sharing of responsibility , such as transfers , or a reduction in the responsibilities. So the suggestion or recommendation that may be given are : 1) . standard contract already should be set in a regulation so that the rights and obligations of the parties can be clearly identified and protected . 2) . The government can regulate through legal instruments that mandatory standard contract approved by the competent authorities , for example the Ministry of Justice and Human Rights , not just registered to the Ministry of Industry and Trade . Setting the standard contract can be put into force legislation that is in the public interest and protect the weak .

Key word : Consumer protection, standard contract, exoneration clause

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan atas segala rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI”.

Besar harapan penulis agar hasil penulisan ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi.

Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Jember, 12 Nopember 2013

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Identitas Tim Penguji.....	v
Halaman Pengesahan Prinsip Publisitas.....	vi
Halaman Pernyataan Originalitas.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan.....	xi
Abstract.....	xiii
Kata Pengantar.....	xv
Halaman Daftar Isi.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Umum.....	14
1.3.2 Tujuan Khusus.....	15
1.4 Manfaat penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis.....	15
1.5 Metodologi Penelitian.....	16
1.5.1 Tipe Penelitian.....	16
1.5.2 Metode Pendekatan.....	16
1.6 Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.1 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	21

2.1.1	Pengertian Perjanjian.....	21
2.1.2	Asas-asas Hukum Perjanjian.....	22
2.1.3	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	24
2.1.4	Unsur-Unsur Perjanjian.....	29
2.2	Perjanjian Baku.....	30
2.2.1	Klausul Baku dalam Perjanjian.....	31
2.2.2	Klausula Eksonerasi.....	46
2.3	Perlindungan Konsumen dan Pengaturannya.....	48
2.3.1	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	50
2.3.2	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	51
2.3.3	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	55
2.3.4	Asas-asas Dalam Perlindungan Konsumen.....	57
2.4	Teori Keadilan Dalam Perlindungan Konsumen.....	60
2.4.1	Pengertian Hak.....	67
2.4.2	Hak Dan Kewajiban Menurut Fitzgerald.....	73
BAB III	: KERANGKA KONSEPTUAL.....	75
BAB IV	: PEMBAHASAN.....	82
4.1	Sistem Perjanjian Yang Berlaku di Indonesia.....	82
4.1.1	Perjanjian Yang Mempunyai Konsekuensi Hukum.....	91
4.2	Keabsahan Perjanjian Baku Dikaitkan Dengan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dan Kesetaraan Para Pihak....	95
4.2.1	Keberadaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	101
4.2.2	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku.....	104
4.2.3	Perjanjian Baku Dalam Konteks Proses Pembuatan Perjanjian.....	116
4.3	Perjanjian Baku Yang Memberikan Posisi Keseimbangan Dan Keadilan Terhadap Para Pihak.....	122
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	131

5.1 Kesimpulan.....	131
5.2. Saran.....	134
Daftar Pustaka	136
Lampiran	